

## **EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN GORONTALO UTARA DAN PROVINSI GORONTALO 2025-2045**

### ***EVALUATION OF THE ALIGNMENT OF LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN DOCUMENTS FOR NORTH GORONTALO REGENCY AND GORONTALO PROVINCE 2025-2045***

**Mohamad Ridho Ferdiyanto Thalib<sup>1</sup>, Eko Adityawan Tumenggung Zees<sup>2</sup>, Ratih Ikawaty R. Hatu<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.

<sup>2</sup>Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

E-mail: [ridhothalib2005@gmail.com](mailto:ridhothalib2005@gmail.com); [ekozees@ung.ac.id](mailto:ekozees@ung.ac.id)

#### **Abstrak**

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom termuda di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam merumuskan rencana pembangunan. Oleh karena itu, penting mengevaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025–2045 terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo 2025–2045 untuk menilai keselarasan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian arah kebijakan dan perencanaan pembangunan melalui analisis isi dokumen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan yang mencakup deskripsi dan evaluasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keselarasan antara RPJPD Kabupaten dan Provinsi bersifat struktural dan normatif, yaitu rencana pembangunan secara umum sudah sesuai. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek strategis dan inovatif, terutama pada implementasi kebijakan yang lebih rinci dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi pembangunan yang tidak hanya menekankan kesesuaian formal, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** RPJP; Evaluasi; Perencanaan; Keselarasan; Gorontalo.

#### ***Abstract***

*North Gorontalo Regency, as the youngest autonomous region in Gorontalo Province, faces unique challenges in formulating development plans. Therefore, it is important to evaluate the North Gorontalo RPJPD 2025–2045 against the Gorontalo Province RPJPD 2025–2045 to assess alignment. This study aims to evaluate the consistency of policy directions and planning through document content analysis. The research method is qualitative, using policy analysis that includes description and evaluation. The findings indicate that the alignment between the Regency and Provincial RPJPDs is structural and normative, meaning the development plans are generally consistent. However, there are shortcomings in strategic and innovative aspects, particularly in the detailed and sustainable implementation of policy directions. Thus, strengthening development strategies is necessary, not only to ensure formal alignment but also to encourage innovation and long-term sustainability.*

**Keywords:** RPJPD, Evaluation, Planning, Alignment, Gorontalo

## A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan di suatu wilayah, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dan fokus pada pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD)<sup>1</sup>. Definsilain, Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dengan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting dalam menilai keberhasilan implementasi rencana dan strategi yang telah dirumuskan<sup>2</sup>.

Evaluasi perencanaan dapat dilakukan terhadap seluruh dokumen perencanaan yang mencakupi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD), pada evaluasi ini akan dikhususkan pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode dua puluh tahun. Sesuai amanat undang-undang tersebut, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1). RPJPD ini selanjutnya menjadi pedoman/navigasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan, dan selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Strategis setiap perangkat daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang berdimensi tahunan<sup>3</sup>.

Pada proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah baik dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus adanya Keselarasan perencanaan pembangunan. Keselarasan perencanaan pembangunan dilakukan dengan evaluasi agar menghindari tumpang tindih program, konflik kebijakan, serta untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan terarah. Konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat

---

<sup>1</sup>Amrin Amrin, Mahmudah Kamal Mahmud, and Ardika Nurfurkon, "Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Sumedang," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 8 (2023): 42–55, <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>.

<sup>2</sup>Romandio Wildan Juventino et al., "Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung," *Jurnal Administrasi Negara*, no. June (2023): 1–8, [https://www.researchgate.net/profile/Keisya-Zahra/publication/371607569\\_Evaluasi\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_Daerah\\_Kelompok\\_11\\_Kelas\\_B/links/648be153b9ed6874a5b1a00b/Evaluasi-Perencanaan-Pembangunan-Daerah-Kelompok-11-Kelas-B.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Keisya-Zahra/publication/371607569_Evaluasi_Perencanaan_Pembangunan_Daerah_Kelompok_11_Kelas_B/links/648be153b9ed6874a5b1a00b/Evaluasi-Perencanaan-Pembangunan-Daerah-Kelompok-11-Kelas-B.pdf).

<sup>3</sup>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004, [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU\\_NO\\_39\\_TAHUN\\_1999\\_HAM\\_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf).

berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan<sup>4</sup>.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten terbungsu yang ada di provinsi Gorontalo, sebagai daerah otonom yang relatif baru akan menghadapi tantangan tersendiri dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian atau keselarasan terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) di tingkat provinsi Provinsi. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menunjukkan seberapa konsisten keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gorontalo utara terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini mengevaluasi keselarasan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara dengan RPJPD Provinsi Gorontalo melalui analisis isi dokumen dan arahan kebijakan. Hasilnya diharapkan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan, mendorong sinergi antar pemerintah daerah, dan meningkatkan efektivitas pembangunan jangka panjang di Gorontalo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kajian ini adalah untuk mengevaluasi keselarasan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang daerah kabupaten Gorontalo Utara terhadap keselarasan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang daerah Provinsi Gorontalo. Untuk metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif karena pada umumnya penggunaan metode kualitatif merupakan suatu metode yang menenkankan pada aspek pemahaman yang lebih dalam. Teknik yang digunakan dalam metode analisis kebijakan menggunakan dua teknik analisis yaitu deskripsi dan evaluasi, karena untuk melihat keselarasan arahan kebijakan pada rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah kabupaten Gorontalo Utara terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Gorontalo. Data yang digunakan pada kajian ini adalah data sekunder mencakupi dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Kebijakan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi,

---

<sup>4</sup>Roehaenah, "Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indaramayu," *Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI Universitas Swadaya Gunung Jati* 1, no. 4 (2019): 39–50, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/REFORMASI/article/view/2649>.

misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD Nasional dan RTRW Provinsi, yang disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Pada RPJPD Provinsi Gorontalo memiliki visi tujuan pembangunan daerah yaitu **“GORONTALO PROVINSI MADANI, YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”** dengan sasaran visi tujuan pembangunan yaitu Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah, Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Peningkatan Peran Daerah dalam Skala Regional dan Nasional, Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penurunan Intensitas emisi GRK menuju net zero emisi<sup>5</sup>.

Untuk Perwujudan Visi Pembangunan 2045, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan maka ditetapkan 8 Misi (Agenda Pembangunan) yang terdiri atas: a. Mewujudkan Transformasi Sosial; b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi; c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola; d. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; f. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; h. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. 8 Misi Pembangunan tersebut dikemas kedalam 3 kerangka pembangunan yaitu: a. Transformasi menuju Gorontalo Madani 2045; b. Landasan Transformasi; c. Kerangka Implementasi dan Transformasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025- 2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara memiliki visi tujuan pembangunan daerah yaitu **“GORONTALO UTARA MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**<sup>6</sup>.

Dalam mewujudkan visi pembangunan, maka ditetapkan 6 misi dalam pembangunan daerah kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri atas: a. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan; b. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi; c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien; d. Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim; e. Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas; e. Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah.

---

<sup>5</sup>Pemerintah Provinsi Gorontalo, “PERATURAN DAERAH NO.4 TENTANG RPJPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029,” 2025.

<sup>6</sup>Pemerintah Gorontalo Utara, “PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045,” 2025.

## 2. Evaluasi Kebijakan

Fokus evaluasi dalam kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara selaras dengan RPJPD Provinsi Gorontalo. Keselarasan ini penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan searah dengan kebijakan provinsi dan saling mendukung. Evaluasi mencakup beberapa aspek utama, yaitu kesesuaian visi dan misi pembangunan, arah kebijakan dan strategi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sinkronisasi tahapan dan waktu pembangunan juga dianalisis agar perencanaan dapat berjalan terpadu. Berikut ini hasil evaluasi keselarasan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Keselarasan RPJPD Kabupaten Gorontalo Terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo Pada Fokus Utama Pembangunan

Rencana	Indikator	Arahan Provinsi Gorontalo	Arahan Gorontalo Utara	Evaluasi
RPJPD	<b>Visi Pembangunan</b>	Gorontalo Provinsi Madani, Yang Maju Dan Berkelanjutan	Gorontalo Utara Maju, Sejahtera, Beradab, Dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman Dan Taqwa	Berdasarkan hasil analisis antara arahan kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045 visi pembangunan antara kedua dokumen perencanaan sudah sesuai/selarasa, karena telah menetapkan pembangunan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan serta untuk penempatan kata Madani memiliki pengertian yang sama dengan beradab serta berlandaskan iman taqwa yaitu pembangunan yang memiliki adab dalam membangun dan menjalankan kehidupannya.
	<b>Misi Pembangunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Transformasi Sosial,</li> <li>Mewujudkan Transformasi Ekonomi,</li> <li>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola,</li> <li>Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan,</li> <li>Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi,</li> <li>Mewujudkan tata kelola</li> </ol>	Berdasarkan Dari hasil analisis antara arahan kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045 untuk tujuan pembangunan sudah selaras untuk 7 misi pembangunan antara rencana pembangunan Provinsi Gorontalo dan rencana pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,

Rencana	Indikator	Arahan Provinsi Gorontalo	Arahan Gorontalo Utara	Evaluasi
		substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,	sedangkan yang belum sesuai adalah arahan untuk
	5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim,	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas, arahan ini telah di tetapkan di dalam arahan pembangunan Provinsi, sedangkan dalam arahan pembangunan Kabupaten belum mencantumkan, berarti hasil evaluasi menunjukkan Kabupaten Gorontalo utara belum memiliki arahan yang khusus untuk kesinambungan dan pembangunan yang mengawal pencapaian Indonesia Emas.
	6.	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan,	5. Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas, dan	
	7.	Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	6. Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah.	
	8.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.		

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan penjelasan pada tabel 1, untuk keselarasan visi dan misi tujuan pembangunan daerah baik pada RPJPD Provinsi Gorontalo dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara sudah selaras dengan fokus tujuan yang sama dalam memajukan, mensejahterakan dan memperhatikan asal berkelanjutan dalam pembangunan. Untuk ketidakselarasan tercantum pada bagian mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas, pada misi ini kesinambungan pembangunan telah tercantum tetapi pada dokumen perencanaan kabupaten belum menjelaskan misi untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang tercantum pada misi RPJMD Provisi Gorontalo.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Keselarasan RPJPD Kabupaten Gorontalo Terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo Pada Arahan Kebijakan

Rencana	Indikator	Arahan Kebijakan Provinsi Gorontalo	Arahan Kebijakan Gorontalo Utara	Evaluasi
RPJPD	Transformasi Sosial	Untuk mewujudkan transformasi sosial Diarahakan untuk Penguatan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan	Untuk mewujudkan transformasi sosial Diarahakan untuk pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial berbasis wilayah	Sudah selaras, karena telah mendukung seluruh arahan dari tujuan utama dari transformasi social.

Rencana	Indikator	Arahan Kebijakan Provinsi Gorontalo	Arahan Kebijakan Gorontalo Utara	Evaluasi
<b>Transformasi Ekonomi</b>		Untuk mewujudkan transformasi Ekonomi Diarahakan melalui penerapan ekonomi hijau dan Ekonomi biru hilirisasi SDA yang menjadi sektor unggulan (pertanian/perikanan), UMKM berbasis digital, dan pariwisata berkelanjutan	Untuk mewujudkan transformasi Ekonomi Diarahakan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan, UMKM, pariwisata, diversifikasi ekonomi di perdesaan, dan penguatan pusat pertumbuhan local	Belum sepenuhnya selaras, untuk meningkatkan melalui komoditas unggulan seperti pertanian, perikanan, dan sektor seperti pariwisata dan UMKM telah tertantumkan. Untuk yang tidak selaras yaitu penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pada rencana provinsi telah dijelaskan penerapan ekonomi hijau dengan jela yaitu indeks ekonomi hijau, penurunan emisi GRK, dan peningkatan bauran energi terbarukan. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara belum menetapkan kebijakan operasional, program, atau target indikator yang mendukung arahan kebijakan ekonomi hijau yang telah direncanakan pada tingkat provinsi.
<b>Transformasi Tata Kelola</b>		Untuk mewujudkan transformasi Tata Kelola Diarahakan melalui Reformasi birokrasi dan pelayanan public, Mendorong penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan digitalisasi sebagai kerangka transformasi tata kelola pemerintahan dan penetapan transformasi digital yang ditargetkanmenyentuh semua sektor pendidikan, layanan publik, ekonomi, dan tata kelola	Untuk mewujudkan transformasi Tata Kelola Diarahakan melalui Peningkatan kualitas ASN, akuntabilitas pemerintahan, serta digitalisasi pelayanan public.	Belum selaras, karena Transformasi digital belum sistematis dan belum menjadi prioritas kabupaten Gorontalo, meski provinsi Gorontalo menjadikan SPBE dan ekosistem digital sebagai tulang punggung transformasi pelayanan publik.
<b>Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi</b>		Untukmewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui	Untukmewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui	Belum sepenuhnya selaras, karena Kabupaten hanya

Rencana	Indikator	Arahan Kebijakan Provinsi Gorontalo	Arahan Kebijakan Gorontalo Utara	Evaluasi
	<b>substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan daerah yang tangguh, yaitu wilayah yang aman dari konflik, bencana sosial, dan ancaman lain.</li> <li>Demokrasi yang substansial, yaitu masyarakat ikut terlibat secara aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar ikut pemilu.</li> <li>Ekonomi makro yang stabil, dengan menjaga inflasi, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan keuangan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat peran masyarakat dalam keamanan lokal seperti melalui Satlinmas dan FKDM.</li> <li>Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum seperti Musrenbang.</li> <li>Menjaga stabilitas ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta pengendalian inflasi dan penguatan daya beli masyarakat.</li> </ul>	<p>menekankan pada partisipasi teknis (seperti Musrenbang), belum menyentuh aspek demokrasi yang lebih dalam, seperti pendidikan politik dan penguatan partai atau lembaga demokrasi lokal.</p>
	<b>Ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pelestarian budaya lokal, penguatan lembaga adat, dan peningkatan toleransi sosial</li> <li>pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti menjaga hutan, pesisir, dan sumber daya alam</li> <li>Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam.</li> </ul>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian budaya religius dan sosial masyarakat, memperkuat identitas lokal, serta membangun masyarakat yang gotong royong dan tangguh secara sosial.</li> <li>Pengelolaan pesisir, konservasi sumber daya alam, dan penanganan wilayah rawan bencana.</li> <li>Penjagaan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.</li> </ul>	<p>Sudah selaras, karena sudah sesuai dengan tujuan utama pada rencana pembangunan tingkat Provinsi yang berfokus pada mewujudkan ketahanan social budaya dan ekologi.</p>

Rencana	Indikator	Arahan Kebijakan Provinsi Gorontalo	Arahan Kebijakan Gorontalo Utara	Evaluasi
	<b>Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan</b>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti wilayah pesisir, perbatasan, dan daerah pinggiran/pedalaman agar setiap wilayah memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pusat pertumbuhan baru sehingga pemerataan akses dan pelayanan dapat tercapai.</li> </ul>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembagian Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara</li> <li>• Peningkatan pembangunan wilayah dengan membangun akses jalan antarwilayah, fasilitas publik, dan kawasan pesisir.</li> <li>• Peningkatan melalui pembentukan sentra ekonomi berbasis potensi lokal di kecamatan-kecamatan.</li> </ul>	<p>Belum sepenuhnya selaras, untuk tujuan secara umum sudah selaras tetapi Kabupaten Gorontalo Utara belum secara jelas menunjukkan hubungan antara pusat-pusat kegiatan wilayahnya dengan kawasan strategis milik provinsi, belum adanya rencana kerja sama lintas batas wilayah dengan kabupaten atau kota lain serta belum ada penetapan indikator yang mengukur kesenjangan pembangunan antarwilayah, tingkat akses masyarakat terhadap layanan dasar, maupun kualitas konektivitas infrastruktur secara terukur.</p>
	<b>Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</b>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat dan merata, tetapi juga berwawasan lingkungan</li> <li>• Penyediaan akses terhadap jalan, air bersih, sanitasi, perumahan, serta transportasi yang memadai</li> <li>• Pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan, seperti penggunaan energi baru terbarukan serta pengembangan infrastruktur cerdas atau berbasis teknologi ramah lingkungan.</li> </ul>	<p>Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan antarwilayah, sistem irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta perbaikan kawasan permukiman.</li> <li>• Membangun akses transportasi darat dan laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman.</li> </ul>	<p>Belum sepenuhnya selaras, untuk tujuan secara umum telah selaras karena focus dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas tetapi adanya ketidaklarasan karena kabupaten Gorontalo Utara belum mencantumkan unsur keberlanjutan dan teknologi ramah lingkungan dalam perencanaannya serta strategi yang mendukung penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan infrastruktur.</p>

Rencana	Indikator	Arahan Kebijakan Provinsi Gorontalo	Arahan Kebijakan Gorontalo Utara	Evaluasi
	<b>Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.</b>	Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penggunaan pendekatan perencanaan yang terpadu, tematik, holistik, spasial dan berbasis bukti.</li> <li>• mendorong perencanaan yang terpadu, saling terhubung antar sektor dan wilayah, serta didukung oleh semua pihak.</li> <li>• Pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melalui skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), serta pembiayaan berbasis lingkungan. mua pihak.</li> </ul>	Untuk mewujudkan arahan pada misi ini yaitu melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kesinambungan arah pembangunan antarperiode dengan tetap mengacu pada visi jangka panjang.</li> <li>• Menguatkan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan agar lebih terukur dan konsisten.</li> <li>• Mendorong peran masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.</li> </ul>	Belum Selaras, hanya selarasa pada kepala kesinambungan pembangunan tidak mencantumkan mengenai pembiayaan melalui KPBU dan CSR serta belu menjelaskan mengenai keterkaitan dengan mengeawal pencapaian Indonesia emas tahun 2045.

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Pada tabel 2 untuk keselarasan antara arahan kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo terhadap RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara masih ada yang belum selaras pada bagian arahan untuk transformasi ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat ketidakserasan antara arahan kebijakan yang tercantum dimana arahan kebijakan secara umum sudah sesuai tetapi pada bagian arahan yang lebih rinci dan lanjutan untuk strategi pada arahan ditingkat provinsi sudah dicantumkan sedangkan untuk arahan kebijakan kabupaten belum sepenuhnya mengimplementasikan arahan dari dokumen perencanaan provinsi. Oleh karena itu, keselarasan antara RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara dan RPJPD Provinsi Gorontalo bersifat struktural dan normatif, namun masih kurang optimal pada aspek strategis dan inovatif.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara dan RPJPD Provinsi Gorontalo memiliki visi yang

sejalan, yaitu bertujuan menciptakan pembangunan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Bahkan, kata "Madani" dalam visi provinsi punya makna yang mirip dengan "beradab serta berlandaskan iman dan takwa" di visi kabupaten. Namun, terdapat ketidaklarasan yaitu terkait misi "Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas". Misi ini sudah tercantum di rencana provinsi, tapi di dokumen kabupaten belum ada arahan khusus yang menjelaskan bagaimana mereka akan mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045. Secara lebih lanjut teridentifikasi kebijakan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara belum sepenuhnya selaras dengan Provinsi Gorontalo pada beberapa arahan kebijakan yaitu transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro, pembangunan kewilayahan, serta sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, termasuk kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun arahan kebijakan secara umum sudah sesuai, Kabupaten Gorontalo Utara belum sepenuhnya mengimplementasikan strategi yang lebih rinci dan lanjutan yang telah ditetapkan oleh provinsi. Oleh karena itu, keselarasan antara kedua dokumen RPJPD ini bersifat struktural dan normatif, namun masih kurang optimal pada aspek strategis dan inovatif.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan secara keselarasan antara RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara dan RPJPD Provinsi Gorontalo bersifat struktural dan normatif yaitu rencana pembangunan yang sudah sesuai secara umum. Namun, masih ada kekurangan dalam aspek strategis dan inovatif, terutama pada implementasi arahan kebijakan yang lebih rinci dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Amrin, Mahmudah Kamal Mahmud, dan Ardika Nurfurkon. "Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Sumedang." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 8, no. 1 (2023): 42–55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>.
- Gorontalo, Pemerintah Provinsi. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029*. 2025.
- Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten. *Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045*. 2025.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40777/UU-No-25-Tahun-2004>.
- Juventino, Romandio Wildan, Nayla Tsabita Putri Darmawan, Danial Ahza Pramudito, Felicio Achmadianto Slamet, dan Keisya Willy Zahra. "Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung.” *Jurnal Administrasi Negara*, no. Juni (2023): 1–8. <https://www.researchgate.net/publication/371607569>.

Roehaenah. “Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI* 1, no. 4 (2019): 39–50. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/REFORMASI/article/view/2649>.